

SURVEY TENTANG INVENTARISI ATAS KEBUTUHAN ANGGOTA DEWAN DALAM PELAYANAN SUBSTANSI DAN FASILITAS PELAYANAN INFORMASI. PENELITIAN HASIL KERJASAMA INSTansi (dengan TUTE FOR STRATEGIC AND DEVELOPMENT STUDIES ISDS) dengan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) atas baiay UNITED NATIONS DEVELOPMENT (UNDP)

Jakarta 12 Oktober – 31 Nopember 2006

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem politik yang demokratis, keberadaan lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai posisi yang sangat determinan bagi pengembangan dan persemaiaan nilai-nilai demokrasi. Dikatakan determinan, karena selain keberadaannya merupakan pencerminan keberlangsungan mekanisme pemisahan (atau sekarang disebutnya dengan distribusi) kekuasaan sebagaimana dicanangkan oleh Montesquieu dengan konsep Trias Politica-nya, juga keberadaan lembaga DPR merupakan lembaga yang berfungsi legislasi yang memproduksi undang-undang.

Keberadaan DPR selain merupakan perimbangan kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain: seperti lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif juga merupakan lembaga yang menghasilkan undang-undang, menetapkan anggaran negara serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Karena tugas dan fungsi tersebut, keberadaan DPR perlu mendapat sokongan secara penuh oleh institusi tertentu yang bertugas memberikan dukungan keahlian sebagai langkah pemberdayaan anggota dewan. Dukungan keahlian ini bermanfaat sebagai "bekal" bagi Anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks ini, baik secara personal maupun kelembagaan DPR, dukungan ini sudah ada. Secara personal DPR mendapat staf pribadi yang bertugas mengatur tugas-tugas yang bersifat "mempribadi". Selain itu DPR pada tingkatan fraksi juga mempunyai Staf Ahli Fraksi yang gajinya "cukup gede". Staf

Ahli Fraksi berfungsi sebagai penopang fungsi-fungsi legislasi di tingkatan Fraksi.

Secara kelembagaan, DPR juga mempunyai Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) yang selama ini mensuplai kebutuhan sarana maupun prasarana para Anggota Dewan. Dalam lembaga P3DI ini terdapat bagian yang menangani kebutuhan pengkajian, bagian yang menangani teknologi informasi, bagian yang menangani keperpustakaan serta bagian yang menangani dokumentasi. Namun keberadaan lembaga ini dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Ini setidaknya tergambar dari pernyataan-pernyataan anggota dewan selama ini yang menunjukkan "kekecewaannya" terhadap keberadaan P3DI.

Sebagai lembaga yang mendapat sorotan Anggota Dewan, P3DI tentu merasa berkepentingan untuk mengetahui secara persis fungsi-fungsi yang belum maksimal sebagaimana disinyalir para Anggota Dewan. Bukan hanya itu, P3DI juga merasa berkepentingan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan para Anggota Dewan yang ada di fraksi, komisi maupun badan-badan kelengkapan DPR. Identifikasi kebutuhan internal para Anggota Dewan ini (*need assessment*) diperlukan guna merancang kebutuhan anggaran untuk diajukan pada Tahun Anggaran 2007.

Untuk kepentingan ini maka P3DI bekerja sama dengan Institute for Strategic and Development Studies dan United Nations Development Program melakukan Survey tentang inventarisi atas Kebutuhan Anggota Dewan dalam Pelayanan Substansi dan Fasilitas Pelayanan Informasi.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian survei ini dilaksanakan untuk tujuan menghasilkan kesimpulan umum atau mencari generalisasi tentang kebutuhan anggota dewan akan sistem layanan data dan informasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, penyusunan anggaran dan pengawasan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengembangkan kapasitas dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada anggota DPR RI

dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dewan yang selama ini dinilai masyarakat masih belum memuaskan.

Waktu Penelitian

Penelitian survei yang dilaksanakan atas kerjasama Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) dengan *Institute Strategic for Development Studies [ISDS]* dan UNDP, mulai dilaksanakan terhitung tanggal 12 Oktober – 31 Nopember 2006.

seederhana (*simple random sampling*) berdasarkan list (daftar anggota dewan) dengan mempertimbangkan proporsionalitas dari jumlah anggota dewan per fraksi yang tercatat di P3DI. Mengingat waktu penelitian terbatas dan kesibukan anggota dewan menjelang persiapan sidang paripurna kedua pada bulan Desember 2006, maka dari 550 anggota dewan yang ada saat ini, penelitian dilakukan terhadap 120 orang yang tersebar di seluruh fraksi (10 fraksi) yang ada di DPR saat ini. Penelitian ini dilakukan pada tingkat kepercayaan proses pengambilan sampel sebesar 95% dengan tingkat kesalahan pengambilan sample (*sampling error*) sebesar $\pm 3.8\%$.

Berikut adalah jumlah anggota dewan untuk setiap fraksi yang ada di DPR RI dan target responden (sampel proporsional) yang digunakan untuk penelitian :

Tabel 3.1. Target Responden

No	Nama Fraksi	Jumlah (orang)	Persen	Jml Sampel (Proporsional)
1	Partai Golkar	129	23,46	28
2	PDIP	109	19,82	24
3	PPP	58	10,55	13
4	Partai Demokrat	57	10,36	12
5	PAN	53	9,64	12
6	PKB	52	9,46	11
7	PKS	45	8,18	10

8	BPD	20	3,64	4
9	PBR	14	2,55	3
10	PDS	13	2,36	3
	Jumlah	550	100	120

Karena kendala waktu dan kesibukan anggota dewan seperti telah disebutkan di atas, maka dari target sampel 120 orang yang berhasil diwawancarai hanya sebanyak 85 orang atau 71 % dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pencapaian Target Responden

No	Nama Fraksi	Target Responden	Tercapai	Persen Keberhasilan
1	Partai Golkar	28	12	43 %
2	PDIP	24	24	100 %
3	PPP	13	6	46 %
4	Partai Demokrat	12	12	100 %
5	PAN	12	8	67 %
6	PKB	11	5	46 %
7	PKS	10	10	100 %
8	BPD	4	2	50 %
9	PBR	3	3	100 %
10	PDS	3	3	100 %
	Jumlah	120	85	71 %

2. Penelitian Kualitatif

Penelitian kedua menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melakukan wawancara mendalam (*Indepth interview*) terhadap sejumlah anggota dewan dengan proses penentuan responden secara *purposive sampling*. *Indepth interview* diperlukan guna menelusuri lebih dalam lagi soal kebutuhan-kebutuhan substantive para anggota dewan yang tidak tercakup dalam kuesioner dengan penelitian kuantitatif (survei).

B. Pengolahan dan Analisis Data

Pengumpulan data primer (proses survei) dilakukan melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) dengan panduan wawancara terstruktur (*questioner*) sebagai alat utama pengumpulan data. Data primer ini (hasil survei) akan diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh dengan cara penelusuran

dokumen, seperti hasil laporan survei/penelitian, buku, terbitan berkala (surat kabar, majalah dan lain-lain).

Data lapangan yang telah terkumpul selanjutnya akan melalui proses *cleaning* dan *inputing* data. Dengan bantuan aplikasi program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) data diolah dalam berbagai tahapan sehingga outputnya bersifat deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi dan *crosstabulation*. *Crosstabulation* digunakan untuk melihat korelasi atau hubungan antara dua variabel atau *single correlation*. Tampilan data hasil pengolahan dengan SPSS dalam bentuk tabel frekuensi, *crosstab* maupun diagram. Sementara untuk analisis kualitatif, data akan dianalisis melalui eksplorasi pertanyaan terbuka serta sumber sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan, sehingga mampu mempertajam data hasil kuantitatif.

Simple random sampling

Responden

Responden

BAGIAN

PENILAIAN KEBUTUHAN TERHADAP SISTEM LAYANAN DATA DAN INFORMASI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI LEGISLASI, PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN

A. Demografi Responden

1. Jenis Kelamin

Dari 85 responden yang berhasil diwawancarai, sebanyak 84.7% adalah laki-laki dan sisanya 15.3% perempuan, seperti terlihat pada diagram berikut.

Diagram 4.1
Jenis Kelamin Responden (n = 85)

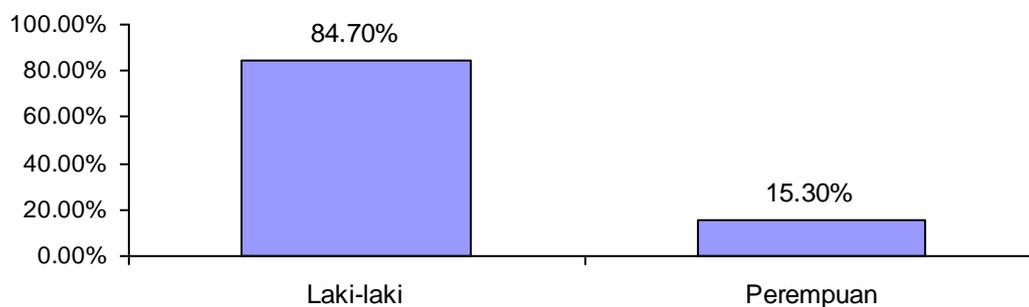


Diagram 1 jelas menunjukkan apabila keterwakilan politik dari kaum perempuan belum mencapai "angka" yang ideal (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65, ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %). Hal ini jelas sekali menjadi "pekerjaan rumah" yang tidak mudah bagi segenap komponen bangsa ini untuk lebih memperhatikan keterwakilan politik kaum perempuan di parlemen. Hal ini bukan hanya semata-mata tuntutan dari undang-undang, namun yang kiranya cukup strategis adalah memberikan kesempatan yang lebih luas agar terjadi keterwakilan kaum perempuan yang lebih representatif.

2. Usia Responden

Dari sisi usia, sebanyak 37,6% berusia antara 41 – 50 tahun dan 11,8% berusia antara 31 – 40 tahun. Anggota DPR yang berusia di atas 61 tahun yang

menjadi responden survei sebanyak 17,6%, selengkapnya terlihat pada diagram berikut.

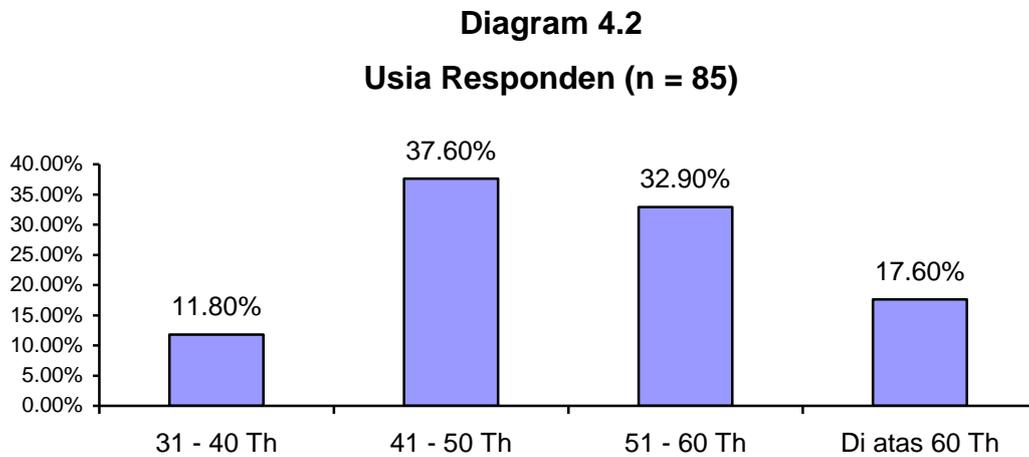
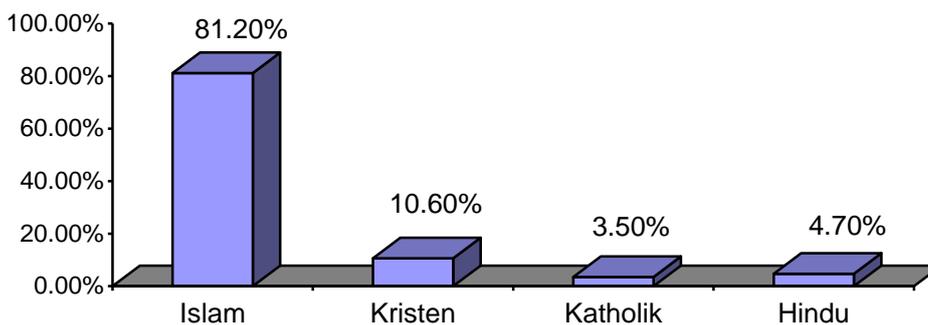


Diagram 2 juga menunjukkan apabila kaum muda (kategori berusia 31-40) masih menempati urutan terbawah, kiranya perlu dilakukan kajian untuk mencari korelasi antara kinerja lembaga parlemen dengan faktor usia para anggota parlemen, karena dalam kecenderungan psikologis, semangat muda pada usia muda, cenderung lebih progresif dan berpikir untuk maju.

3. Agama

Dari sisi agama, sebagian besar responden survei beragama Islam (81,2%), Kristen Protestan 10,6%, Katholik 3,5% dan 4,7% beragama Hindu.

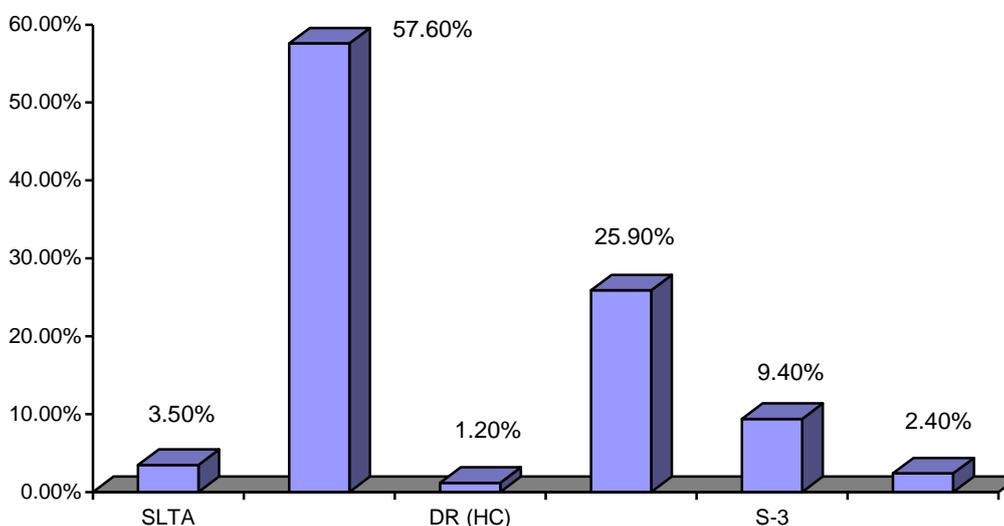
Diagram 4.3
Agama Responden (n = 85)



4. Pendidikan Terakhir

Dari sisi pendidikan terakhir responden, lebih dari separuh (57.6%) berpendidikan akademi sampai sarjana S1, tamat SLTA 3,5%, DR Honoris Causa 1,2%, S-2 25,9%, S-3 9,4% dan yang tidak mencantumkan tingkat pendidikan sebanyak 2,4%.

Diagram 4.4
Tingkat Pendidikan Responden (n = 85)



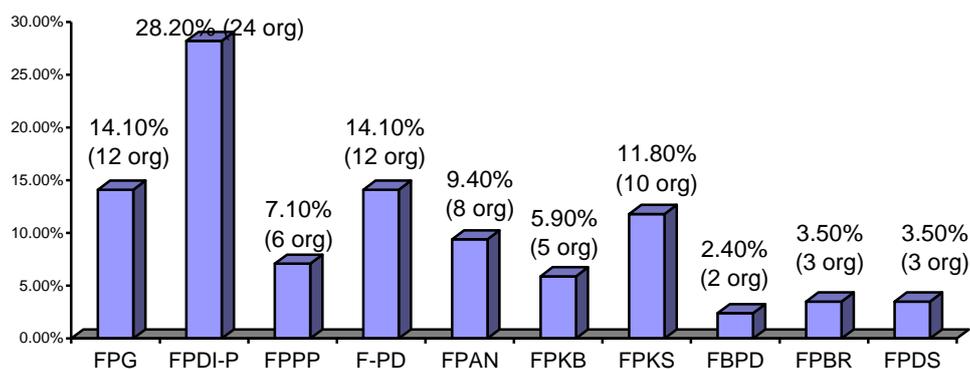
Gambaran yang menggembirakan adalah apa yang terlihat pada diagram 4, karena lebih dari 50 % (57,60%) responden mengaku memiliki latar belakang pendidikan formal sarjana Strata 1, yang artinya pola pikir dan cara menganalisis

permasalahan yang dilakukannya akan sangat ditunjang oleh kemampuan metodologinya, yang tentunya sudah dipahami oleh responden.

5. Asal Fraksi

Berdasarkan fraksi yang ada di DPR RI, sebagian besar berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 28,2%, disusul Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat masing-masing 14,1%. Dari sisi fraksi, hasil survei selengkapnya terlihat pada diagram berikut.

Diagram 4.5
Komposisi dan Jumlah Responden Berdasarkan Fraksi (n = 85)



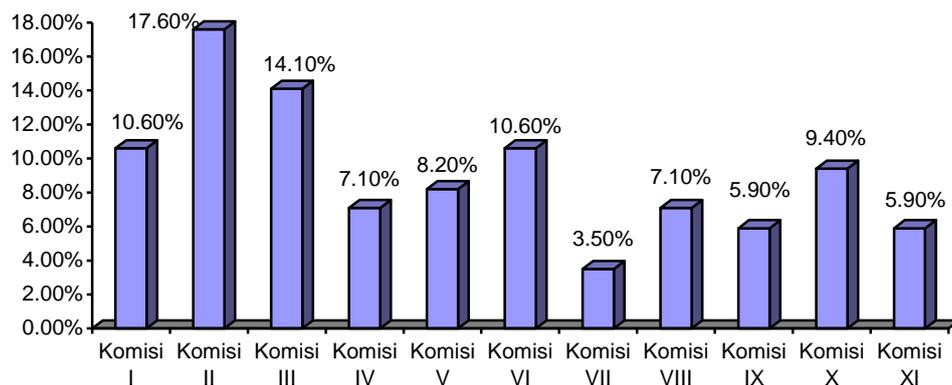
Jika kita lihat diagram 5 di atas, maka gambarannya tidak sama dengan kenyataannya, karena kendala teknis yang dialami untuk mencapai target responden sebanyak 120 sampel tidak terpenuhi maka terlihat apabila jumlah responden dari Fraksi PDI-P lebih banyak dibandingkan responden dari fraksi terbesar, yaitu Fraksi Partai Golkar. Namun begitu, mengingat tujuan penelitian ini adalah *needs assessment* (penilaian kebutuhan), maka kecenderungan asal fraksi tidak terlalu menentukan jawaban responden yang homogen. Homogenitas itu dapat diukur dari pandangan mereka mengenai *supporting system* yang membantu kerja responden, sehingga bisa berdampak bagi peningkatan kualifikasi kerja DPR.

6. Keanggotaan Dalam Komisi

Berdasarkan keanggotaan dalam komisi, sebagian besar responden survei berasal dari komisi II (17,6%), disusul komisi III 14,1%, komisi I dan IV masing-masing 10,6% dan paling sedikit berasal dari komisi VII 3,5%. Hasil survei selengkapnya terlihat pada diagram berikut.

Diagram 4.6

Responden Berdasarkan Komisi (n = 85)

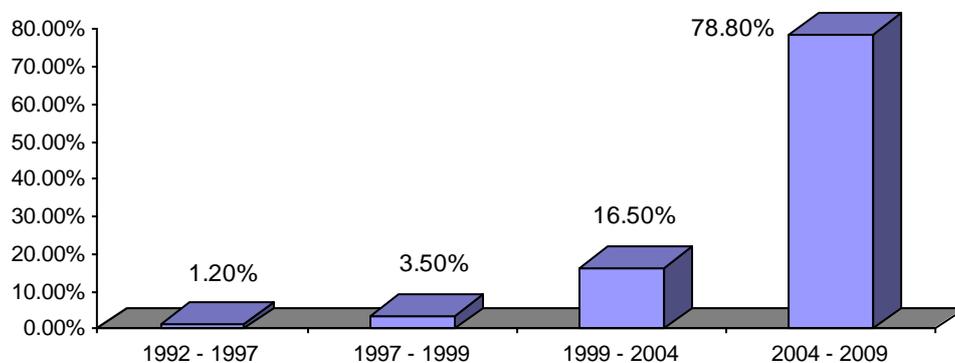


7. Periode Keanggotaan di DPR

Berdasarkan periode masuk sebagai anggota DPR RI, lebih dari tiga perempat (78,8%) responden tercatat sebagai anggota dewan pada periode 2004 – 2009, hanya 1,2% yang tercatat sebagai anggota dewan sejak periode 1992 sampai sekarang. Hasil survei selengkapnya terlihat pada diagram berikut.

Diagram 4.7

Periode Keanggotaan di DPR (n = 85)



Responden yang terbesar (78,80 %) mengaku baru kali pertama menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 – 2009, sedangkan responden yang sudah pernah menjadi anggota dewan sejak periode 1999 – 2004 adalah 16,50 %, dan yang telah menjabat sebagai anggota dewan sejak periode 1997 – 1999 adalah 3,50 %. Uniknya masih ada 1,20 % responden yang telah menjadi anggota dewan sejak periode 1992 – 1997. Sejatinya, jika responden baru kali pertama (atau sudah 2 periode sejak tahun 1999-2004), memahami tentang tuntutan reformasi dan arus demokratisasi yang berkembang di masyarakat. Karena itulah semestinya kinerja DPR pada periode ini seharusnya lebih meningkat.

B. Temuan Lapangan

1. Pengenalan dan Penilaian terhadap P3DI

Berdasarkan hasil survei, ternyata tidak semua anggota dewan mengetahui keberadaan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), sebagai lembaga yang memberikan layanan data dan informasi untuk meningkatkan kinerja DPR. Hanya 61,2 % yang mengetahui keberadaan P3DI, sementara sisanya 38,8 % tidak mengetahui P3DI. Hal ini bisa kita pahami, karena selain sebagian besar responden (78,8 %) merupakan anggota baru di DPR Periode 2004 – 2009, juga karena kesibukannya, baik di Gedung DPR maupun di luar Gedung DPR, sehingga "tidak sempat mengenali lembaga *pen-support* data maupun informasi yang selama ini menjadi kebutuhannya". Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan pengetahuan responden mengenai lembaga P3DI.

Tabel 4.1
Pengenalan Terhadap P3DI (n = 85)

Mengetahui adanya P3DI di lingkungan Setjen DPR?	Valid Persen
Ya	61.2
Tidak	38.8
Total	100.0

Sumber : Hasil Survei

Tabel 4.2 menggambarkan responden (para anggota dewan) mengetahui adanya P3DI dan sekaligus sebagai sumber informasi yang selama ini diperlukannya. Keberadaan P3DI ini tentunya akan sangat menunjang tugas-tugas kedewanan yang dilakukan oleh para responden.

Tabel 4.2
Sumber Informasi Tentang P3DI (n = 52)

Dari mana mengetahui keberadaan P3DI ?	Valid Persen
1. Pejabat pimpinan Setjen DPR RI	17.3
2. Media publikasi P3DI	13.5
3. Dari partai, fraksi, komisi, sesama anggota dewan,	13.3
4. Pejabat/staf P3DI	11.5
5. Anggota dewan	11.5
6. Sespri/Aspri	9.6
7. Humas, media publikasi P3DI dan aspri	9.6
8. Humas DPR RI	7.7
9. Dari Sespri/Aspri dan Ketua Legislasi	5.8
Total	100.0

Sumber : Hasil Survei

Dari hanya 52 orang responden yang mengetahui keberadaan P3DI, hanya 17,3 % yang menjawab pengetahuan mereka tentang P3DI berasal dari Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sebanyak 13,5 % mengetahui dari media publikasi P3DI itu sendiri, 13,5 %, dari sesama anggota dewan maupun pejabat/staf P3DI masing-masing 11,5 % dan dari sespri/aspri sebesar 9,6 %.

Menurut penilaian lebih dari seperempat orang anggota dewan (25,9 %) P3DI adalah lembaga yang melayani kebutuhan para anggota dewan, menerbitkan buku-buku, mengadakan penelitian, melayani jasa internet, komputer dan mensuplai tenaga ahli bagi keperluan anggota dewan.

Sedangkan bagi para anggota dewan (38,8 %) yang tidak mengetahui adanya P3DI, mereka (16,5 %) mengaku bahwa selama satu tahun terakhir ini, mereka memperoleh sumber informasi dari internet, koran dan TV. Data-data hasil survei selengkapnya dapat di lihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3

Sumber Informasi Anggota Dewan Yang Tidak Mengetahui P3DI (n = 33)

Jika TIDAK mengetahui P3DI, selama 1 tahun terakhir ini, dari mana bapak/ibu memperoleh sumber informasi?	Valid Persen
1. Internet, koran dan TV	16.5
2. Aspri	9.4
3. Staf fraksi, komisi, LSM dan partai politik	3.5
4. Rapat anggota, brosur, buku-buku, dialog lintas fraksi	13.2
Total	100.0

Sumber : Hasil Survei

2. Kebutuhan Layanan Bidang Pengkajian

Lebih dari separuh (64,3 %) anggota dewan tidak mengetahui tentang layanan bidang pengkajian di lingkungan P3DI, sementara yang mengetahui adanya layanan bidang pengkajian hanya 35,7 %. Mereka mengaku selama ini memperoleh layanan data dan informasi mengenai Majalah "Kajian" (20,0 %), penyediaan data/informasi untuk keperluan penulisan naskah (20,0 %), bantuan kajian masalah isu-isu tertentu (13,3 %), bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik RUU (10,0 %), bantuan kajian masalah isu-isu tertentu, pembahasan RUU dan analisis anggaran (6,7%), penyediaan data/informasi untuk keperluan penyusunan anggaran (6,7 %) dan bantuan pengkajian masalah atau isu-isu tertentu (6,7 %). Lebih dari separuh anggota DPR (56,7 %) mengaku "cukup puas" dengan layanan bidang pengkajian, sementara yang mengaku "puas" (16,7 %), "tidak puas" (20,0 %) dan "sangat tidak puas" (6,7 %).

Kenapa mereka "tidak puas" atau "sangat tidak puas" dengan layanan bidang pengkajian yang dilakukan P3DI? Mereka mengaku, "kurang profesional, lamban dalam penanganan keluhan para anggota dewan" (5,9 %), alasan lainnya, karena "analisis akademiknya kurang memadai" (2,4 %) dan karena alasan, "birokrasinya berbelit-belit, komplain komputer saja harus pakai surat" (1,2 %). Oleh karena itu mereka yang tidak puas ini menyarankan untuk ditingkatkan kemampuannya dalam bidang "pembuatan RUU perlu staf ahli dalam pembahasannya" (16,7 %), "perlu tenaga ahli dalam pembahasan naskah akademik untuk pembuatan RUU terutama ketika rapat kerja dengan pemerintah" (10,0 %). Hasil survei selengkapnya dapat di lihat pada lampiran tabel frekuensi.

Berdasarkan fraksi (*hasil crosstabulation*), secara umum (56,7 %), semua fraksi mengaku "cukup puas" dengan layanan bidang pengkajian. Sementara itu, yang merasa "tidak puas" dengan kinerja layanan bidang pengkajian, yakni sebagian kecil (10,0 %) anggota fraksi PDI-P, PPP (3,3 %), PKS (3,3 %) dan PBR (3,3 %). Sementara yang mengaku "sangat tidak puas" muncul dari Fraksi PKB 6,7 %. Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada layanan bidang pengkajian untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam bidang "pangkajian masalah isu-isu tertentu" (6,7 %), Fraksi PKB menyarankan perlu ditingkatkan lagi kemampuan dalam hal "penyediaan data/informasi untuk penyusunan anggaran" (6,7 %), Fraksi PDI-P dan PKB menyoroti juga soal "perlunya staf ahli dalam analisis anggaran" (6,6 %), "perlunya staf ahli untuk mengkaji naskah akademik dalam pembuatan RUU" (6,7 %). Fraksi PG dan PAN menyarankan perlunya staf ahli dalam "penyusunan naskah akademik pembuatan RUU" (6,6 %), "Perlu didampingi staf ahli/peneliti dalam pembahasan RUU dengan pemerintah", hal ini disarankan oleh 6,6 % anggota Fraksi PPP dan PDS. "Perlu ditingkatkan lagi dalam hal penyediaan data/informasi untuk pembuatan RUU", hal ini disarankan oleh 3,3 % anggota Fraksi PBR. Fraksi PKS menyarankan perlunya "kecepatan informasi untuk segera disampaikan kepada dewan", "perlu bantuan staf ahli dalam pembuatan RUU dan perlu data/informasi untuk penyusunan anggaran" (13,3 %).

Hasil kajian yang dibutuhkan oleh anggota dewan adalah "laporan penelitian dalam bentuk ringkasan" (20,0 %), "tinjauan ilmiah, ringkasan penelitian, makalah pendek dan jurnal" (13,3 %), "data statistik, jurnal, buletin, info on line (10,0 %), penelitian lengkap/ringkasan (10,0 %), tinjauan ilmiah, makalah pendek (10,0 %) dan tulisan ringan, buletin, data statistik dan info on line" (10,0 %).

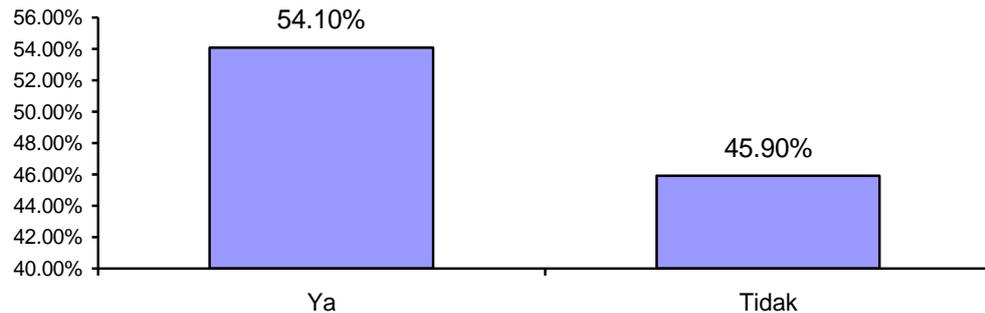
Berdasarkan fraksi (*hasil crosstabulation*), anggota Fraksi PDI-P dan Golkar, masing-masing 30,0 % dan 20,0 %, menginginkan hasil-hasil kajian dalam bentuk, laporan penelitian dalam bentuk ringkasan, tinjauan ilmiah, ringkasan penelitian, makalah pendek, data statistik, jurnal, buletin, info on line, penelitian lengkap dan makalah pendek. Sementara Fraksi Partai Golkar menginginkan laporan penelitian lengkap, ringkasan, tinjauan ilmiah, data statistik, jurnal dan info on line. Fraksi PPP (6,6 %) menginginkan, laporan penelitian dalam bentuk ringkasan, tinjauan ilmiah dan lembar informasi. Fraksi Partai Demokrat, 3,3 %, menginginkan hasil kajian dalam bentuk data statistik, jurnal, buletin dan info on line. Fraksi PAN, 3,3 %, menginginkan hasil kajian dalam bentuk informasi info on line, Fraksi PKB, 10,0 %, menginginkan laporan penelitian ilmiah lengkap/ringkasan, tinjauan ilmiah dan makalah pendek. Fraksi PKS, 13,3 %, menginginkan hasil kajian dalam bentuk laporan penelitian ringkasan, tinjauan ilmiah dan makalah pendek serta semua bidang yang terkait anggota dewan. Fraksi PBR, 3,3 %, menginginkan hasil kajian dalam bentuk laporan penelitian ringkasan, dan Fraksi PDS, 6,7 %, menginginkan hasil kajian dalam bentuk ringkasan laporan penelitian dan informasi on line.

Dari penilaian tersebut di atas, lebih dari separuh (66,7 %) anggota dewan menilai bahwa selama ini kemampuan staf ahli/peneliti bidang pengkajian "belum memadai", sementara yang menilai "sudah memadai" hanya 33,3 %. Karena "belum memadai", mereka menyarankan untuk lebih "meningkatkan kemampuan tenaga staf ahli/peneliti dalam bidang yang relevan dengan kebutuhan anggota dewan" (35,0 %) serta "penambahan jumlah staf ahli" (25,0 %) dan "peningkatan pemahaman etika dan profesionalisme" (15,0 %).

3. Kebutuhan Layanan Bidang Data dan Sarana Informasi

Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh (54,1 %) anggota dewan mengetahui adanya layanan bidang data dan sarana informasi di lingkungan P3DI, hanya 45,9 % yang tidak mengetahui adanya layanan bidang tersebut.

Diagram 4.8
Pengetahuan Layanan Bidang Data dan Sarana Informasi P3DI (n = 85)



Lebih dari separuh anggota dewan mengaku pernah memperoleh jenis-jenis layanan di bidang data dan sarana informasi seperti, jaringan komputer, bantuan teknis maupun perawatan komputer (39,1 %), selain itu, mereka juga menerima bantuan teknis ketika terjadi gangguan jaringan komputer (17,4 %) dan bantuan teknis gangguan, instal maupun perawatan komputer (13,0 %). Dan nampaknya, lebih dari separuh anggota dewan merasa "cukup puas" (69,6 %) dengan layanan bidang data dan sarana informasi yang selama ini diberikan P3DI, sementara sisanya, 15,2 % mengaku "puas" dan yang mengaku merasa "tidak puas" atau "sangat tidak puas" sebanyak 13,0 % dan 2,2 %. Kenapa mereka *tidak puas/sangat tidak puas* dengan layanan bidang data dan sarana informasi yang diberikan P3DI? Mereka menjawab bahwa "kurang profesional, lamban dalam penanganan keluhan" (3,5 %), "kurang memanfaatkan jasa layanan yang diberikan P3DI, karena P3DI itu sendiri kurang dikenal" (2,4 %) dan "birokrasinya rumit, kurang efisien", "tupoksi P3DI belum sinkron dengan tugas anggota dewan" diungkapkan oleh masing-masing 1,2% anggota dewan. Diagram-diagram berikut adalah pengakuan para anggota dewan.

Diagram 4.9
Penilaian Terhadap Layanan Bid. Data & Sarana Informasi (n = 46)

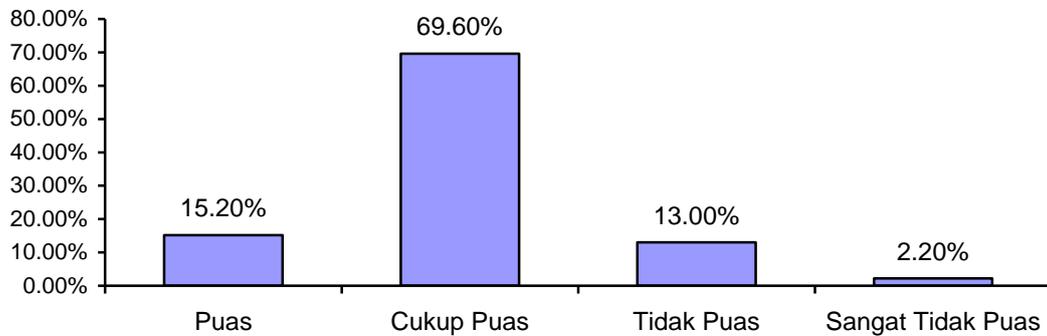
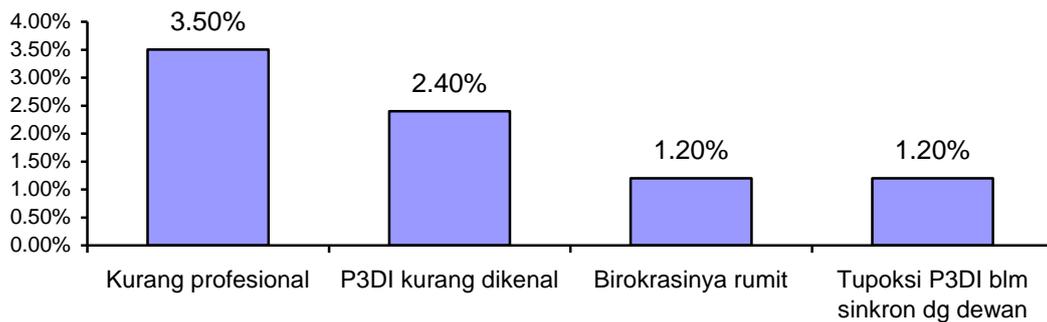


Diagram 4.10
Alasan Ketidakpuasan Layanan Bid. Data & Sarana Informasi (n = 7)



Berdasarkan penilaian tersebut, sebanyak 28,3 % anggota dewan menyarankan agar "jaringan komputer, bantuan teknis dan perawatan komputer" harus lebih ditingkatkan kemampuannya. Selain itu, 19,6 % dan 13,0% menyarankan agar "bantuan teknis gangguan komputer harus cepat tanggap" dan "fasilitas jaringan internet jangan di blok". Tabel 4.4 berikut memuat hasil lengkap penelitian survei.

Tabel 4.4
Jenis Layanan yang Harus Ditingkatkan (n = 46)

Jenis Layanan yang Harus Ditingkatkan	Valid Persen
Jaringan komputer, bantuan gangguan teknis dan perawatannya	28.3
Bantuan teknis ketika terjadi gangguan komputer harus cepat tanggap	19.6
Fasilitas jaringan internet jangan di blok	13.0
Perawatan jaringan komputer harus rutin	10.9
Pemasangan jaringan komputer baru	6.5
Bantuan teknis dan pemasangan internet di 2 tempat dalam satu ruangan	6.5
Harus ada training/workshop dalam hal kearsipan bagi Aspri	4.3
Jaringan computer, harus ada pusat data yang dapat diakses anggota dewan	6.5
Harus pakai Hot Spot dan perlu bantuan untuk mencari data dalam computer	4.4
Total	100.0

Sumber : Hasil Survei

Terlepas dari saran-saran yang harus ditingkatkan kemampuannya oleh bidang data & sarana informasi P3DI, lebih dari separuh (63,0%) anggota dewan menilai bahwa tenaga teknis layanan bidang data & informasi P3DI “sudah memadai”, hanya 37,0% yang menilai “belum memadai”. Jika dinilai “belum memadai” upaya apa yang harus dilakukan oleh tenaga teknis bidang data & informasi? Terhadap pertanyaan ini, lebih dari seperempat anggota dewan (29,4%), menyarankan agar “P3DI menyediakan staf ahli/peneliti dalam bidang yang relevan”, “P3DI harus menambah jumlah & teknis pranata komputer”, “peningkatan pemahaman etika dan profesionalisme” (17,6%), 11,8% menyarankan untuk meningkatkan “pemahaman etika & profesionalisme serta meningkatkan kemampuan teknis komputer” dan masing-masing 5,9% menyarankan agar P3DI “harus menambah pranata komputer serta mempunyai

empaty yang tinggi” dan “penambahan jumlah staf/peneliti dalam setiap bidang yang dinilai masih kurang”.

Selanjutnya, bagaimana penilaian anggota dewan terhadap kemampuan komputer di ruang kerjanya masing-masing? Terhadap pertanyaan ini, lebih dari separuh (60,9%) menilai bahwa kemampuan komputer di ruang kerjanya “sudah memadai”, hanya 39,1% yang menilai “belum memadai”. Karena dinilai “belum memadai” maka 12,9% anggota dewan menyarankan agar kecepatan dan kemampuan komputer perlu ditambah, 2,4% anggota dewan menyarankan agar kemampuan teknologi komputer harus di *up grade* terus. Bagaimana penilaian anggota dewan terhadap kemampuan jaringan internet di ruang kerjanya masing-masing? Terhadap pertanyaan ini, lebih dari separuh (60,9%) anggota dewan mengaku, kapasitas jaringan internet “belum memadai”, hanya 39,1% yang mengaku kemampuan jaringan internet di ruang kerjanya “sudah memadai”. Jika belum memadai, upaya apa saja yang harus dilakukan? Lebih dari seperempat (28,2%) anggota dewan menyarankan agar layanan bidang data & informasi P3DI harus menambah kapsitas jaringan internet dan komputer.

Diagram 11
Penilaian Kemampuan Komputer (n = 46)

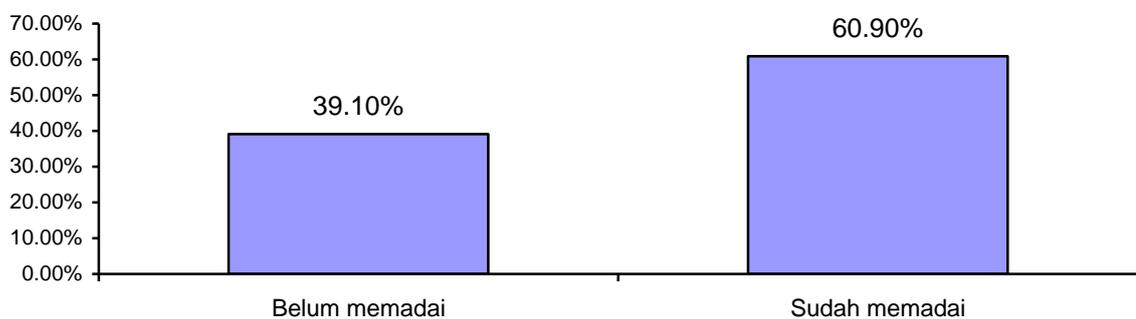
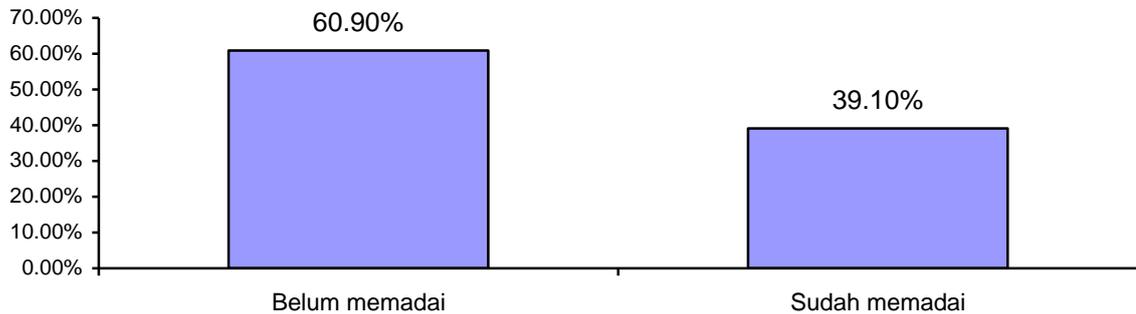


Diagram 12

Penilaian Kemampuan Jaringan Internet (n = 46)



Berdasarkan fraksi (data hasil crosstab), Fraksi PDI-P (32,6%) menyarankan agar layanan bidang data & informasi P3DI harus ditingkatkan kemampuannya dalam bidang, “teknis pemasangan jaringan komputer, teknis pelayanan yang cepat ketika terjadi gangguan jaringan komputer, perawatan maupun pemasangan komputer baru di setiap ruangan, selain itu, fasilitas jaringan internet jangan di blok”. Saran yang hampir sama muncul dari Fraksi Partai Golkar (19,6%), yakni, teknis pemasangan jaringan komputer, perawatan, pelayanan gangguan dan fasilitas internet harus di buka terus. Sebanyak 15,2% anggota Fraksi PKS menyarankan agar staf data & informasi P3DI harus meningkatkan kemampuannya dibidang, bantuan teknis gangguan, perawatan, pemasangan baru, menggunakan Hot Spot dan pembekalan panduan teknis gangguan jaringan komputer kepada aspri/sespri.

Anggota Fraksi PAN, 8,7% menyarankan agar bantuan teknis gangguan jaringan komputer maupun internet, perawatan dan cara pemasangan jaringan baru perlu terus ditingkatkan kemampuannya. Anggota Fraksi PPP, 6,5% menyarankan agar bantuan teknis gangguan jaringan komputer perlu lebih ditingkatkan. Anggota Fraksi PD, PKB dan BPD masing-masing sebanyak 4,3%, menyarankan peningkatan pemeliharaan jaringan komputer maupun internet, pelayanan gangguan, pemasangan jaringan baru serta internet jangan di blok. Dan anggota Fraksi PBR dan PDS masing-masing 2,2% lebih menyoroti soal pentingnya pembekalan bagi aspri dalam hal gangguan teknis pelayanan melalui pelatihan dan pentingnya pemeliharaan fasilitas komputer dan internet secara rutin. Secara umum, *kecuali Fraksi PBR*, lebih dari separuh anggota fraksi

(63,0%) menilai bahwa teknisi bidang layanan data & informasi P3DI "sudah memadai", hanya 37,0% anggota fraksi di DPR yang menilai "belum memadai", mereka adalah 8,7% dari Fraksi PG, 4,3% Fraksi PDI-P, 2,2% Fraksi PD, 4,3% Fraksi PAN, 2,2% Fraksi PKB, 10,9% Fraksi PKS, 2,2% Fraksi BPD dan 2,2% Fraksi PBR.

Karena dinilai "belum memadai", 29,4% anggota Fraksi PKS menyarankan agar bidang layanan data & informasi meningkatkan pemahaman etika dan profesionalisme, pengadaan staf/peneliti dalam bidang yang relevan, jaringan internet menggunakan sistem *hot spot* dan penambahan jumlah staf ahli/peneliti. Sementara itu, 23,5% anggota Fraksi PG menyarankan hal yang sama yakni harus lebih meningkatkan pemahaman etika dan profesionalisme, peningkatan jumlah teknisi pranata komputer dan harus memiliki empati yang tinggi. Pengadaan staf ahli/peneliti di bidang yang relevan dan peningkatan jumlah teknisi pranata komputer, disarankan oleh 11,8% anggota Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN. Dan masing-masing sebesar 5,9% anggota Fraksi PD menyarankan peningkatan jumlah & teknisi pranata komputer, Fraksi PKB dan BPD menyarankan pentingnya penambahan staf ahli/peneliti dalam bidang yang relevan, dan Fraksi PBR menyarankan perlunya penambahan staf ahli/peneliti dalam semua bidang.

Menyoroti soal kemampuan komputer di ruang kerja masing-masing anggota DPR, kecuali Fraksi PD dan PBR, lebih dari separuh anggota fraksi lainnya (60,9%) menilai, kemampuan komputer di ruangnya "sudah memadai", hanya 39,1% yang menilai "belum memadai". Karena dinilai belum memadai, sebanyak 28,2% anggota Fraksi PDI-P menyarankan "agar kecepatan loading internet dan komputer perlu ditambah selain harus ada *scanner* komputer. Fraksi PD (14,1%) menyarankan untuk tidak memblok fasilitas internet dan mencoba menggunakan *hot spot*. Fasilitas internet dengan sistem *hot spot*, tambah kapasitasnya juga dilontarkan anggota Fraksi PKS (11,8%). Keluhan soal lambannya kecepatan *loading* data dalam internet, juga dilontarkan oleh masing-masing anggota Fraksi BPD (2,4%) dan PBR (3,5%).

Bagaimana dengan kemampuan jaringan internet di ruang kerja masing-masing anggota dewan? Terhadap pertanyaan ini, lebih dari separuh (60,9%)

anggota DPR yang terhimpun dalam 10 fraksi menilai "belum memadai", hanya 39,1% yang menilai "sudah memadai". Bagi anggota dewan yang menilai "belum memadai" alasannya secara umum sama yakni, kapasitas dan jaringan internet perlu ditingkatkan (28,2%), selain, P3DI harus punya 1 (satu) server yang dapat diakses oleh semua anggota dewan (1,2%). Berikut penilaian para anggota dewan terkait kapasitas jaringan internet yang ada di ruang kerja masing-masing anggota dewan.

Tabel 4.5

Penilaian Kapasitas Komputer di Ruang Kerja Dewan (n = 46)

Penilaian	FPG	FPDI-P	FPPP	F PD	F PAN	FPKB	FPKS	FBPD	FPBR	FPDS	Total
Blm memadai	4 (8.7%)	3 (6.5%)		2 (4.3%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	4 (8.7%)	1 (2.2%)	1 (2.2%)		18 (39.1%)
Sudah memadai	5 (10.9%)	12 (26.1%)	3 (6.5%)		2 (4.3%)	1 (2.2%)	3 (4.3%)	1 (2.2%)	-	1 (2.2%)	28 (60.9%)
Total	9 (19.6%)	15 (32.6%)	3 (6.5%)	2 (4.3%)	4 (8.7%)	2 (4.3%)	7 (15.2%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	1 (2.2%)	46 (100%)

Tabel 4.6

Penilaian Kapasitas Jaringan Internet di Ruang Kerja Dewan (n = 46)

Penilaian	FPG	FPDI-P	FPPP	F PD	F PAN	FPKB	FPKS	FBPD	FPBR	FPDS	Total
Blm memadai	7 (15.2%)	6 (13.0%)	2 (4.3%)	2 (4.3%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	4 (8.7%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	1 (2.2%)	28 (60.9%)
Sudah memadai	2 (4.3%)	9 (19.6%)	1 (2.2%)		2 (4.3%)	1 (2.2%)	3 (4.3%)	-	-	-	18 (39.1%)
Total	9 (19.6%)	15 (32.6%)	3 (6.5%)	2 (4.3%)	4 (8.7%)	2 (4.3%)	7 (15.2%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	1 (2.2%)	46 (100%)

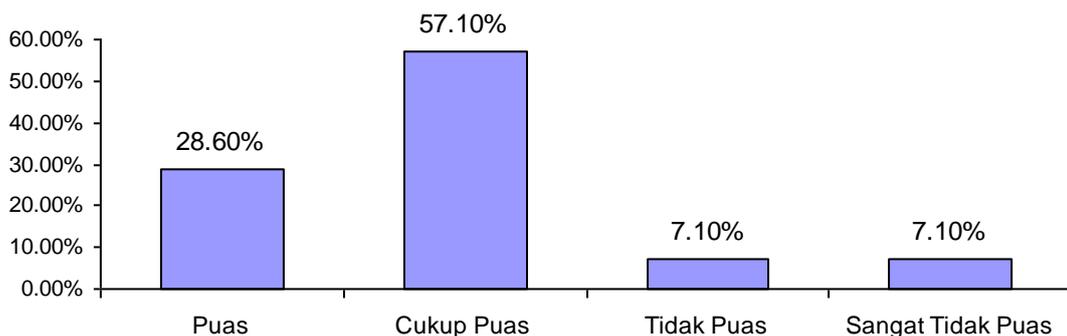
4. Kebutuhan Layanan Bidang Arsip dan Dokumentasi

Arsip dan dokumentasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan staf di lingkungan P3DI karena peranannya yang sangat penting terkait

kearsipan dan dokumentasi. Tanpa arsip dan dokumentasi, rasanya sulit untuk berbicara fakta guna melihat dan menjabarkan kebijakan selanjutnya. Tetapi anehnya, lebih dari tiga perempat (83,5%) anggota dewan mengaku tidak mengenal layanan bidang arsip dan dokumentasi di lingkungan P3DI, hanya sebagian kecil (16,5%) yang mengetahui adanya bidang ini.

Bagi anggota dewan yang mengetahui adanya bidang layanan ini, mereka mengaku memperoleh layanan "peminjaman arsip & dokumentasi mengenai peraturan perundang-undangan" (42,9%), "peminjaman arsip pembahasan RUU dalam bentuk teks & dokumen UU" (28,6%) dan masing-masing 7,1% mengaku dilayani soal "peminjaman arsip pembahasan RUU dalam bentuk teks tertulis" dan "peminjaman arsip & dokumen UU serta surat keputusan dewan". Mereka mengaku "cukup puas" (57,1%) dan "puas" (28,6%) dengan bidang layanan arsip & dokumentasi ini. Anggota dewan yang menilai "tidak puas" dan "sangat tidak puas" dengan bidang layanan ini masing-masing sebesar 7,1%, dengan alasan, semuanya (2,4%) mengaku "sulit untuk mengakses informasi yang diperlukan serta kajian undang-undangnya sangat terbatas".

Diagram 4.13
Penilaian Kemampuan Bidang Arsip & Dokumentasi (n = 14)



Untuk lebih meningkatkan kapasitasnya sebagai pemasok data & informasi bagi kebutuhan anggota dewan, jenis-jenis layanan data & informasi dari bidang arsip dan dokumentasi yang perlu ditingkatkan kemampuannya, menurut pendapat para anggota dewan adalah: "dokumentasi perundang-

undangan dan surat keputusan dewan (35,7%), "peminjaman arsip pembahasan RUU dalam bentuk tes (21,4%), "arsip & semua informasi harus dalam bentuk CD" (14,3%), "adakan training untuk aspri menyangkut soal *filling* arsip" (14,3%) dan masing-masing 7,1% menyarankan supaya, "peminjaman arsip pembahasan RUU dalam bentuk kaset" dan "peminjaman arsip & dokumentasi surat-surat keputusan dewan". Menurut pengakuan lebih dari separuh (61,5%) anggota dewan, tenaga arsiparis yang ada di bidang layanan arsip & dokumentasi masih "belum memadai", sementara sisanya (38,5%) mengaku, tenaga arsiparis yang ada saat ini "sudah memadai". Oleh karena itu, tenaga arsiparis yang ada saat ini harus lebih "meningkatkan pemahaman etika dan profesionalismenya" (44,4%), disarankan juga agar P3DI "menambah tenaga arsiparis" (33,3%) dan "perlu penambahan tenaga arsiparis yang dibarengi dengan upaya peningkatan pemahaman etika & profesionalisme" (22,2%).

Diagram 4.14

Jenis Layanan Data & Informasi Yang Perlu Ditingkatkan (n = 14)

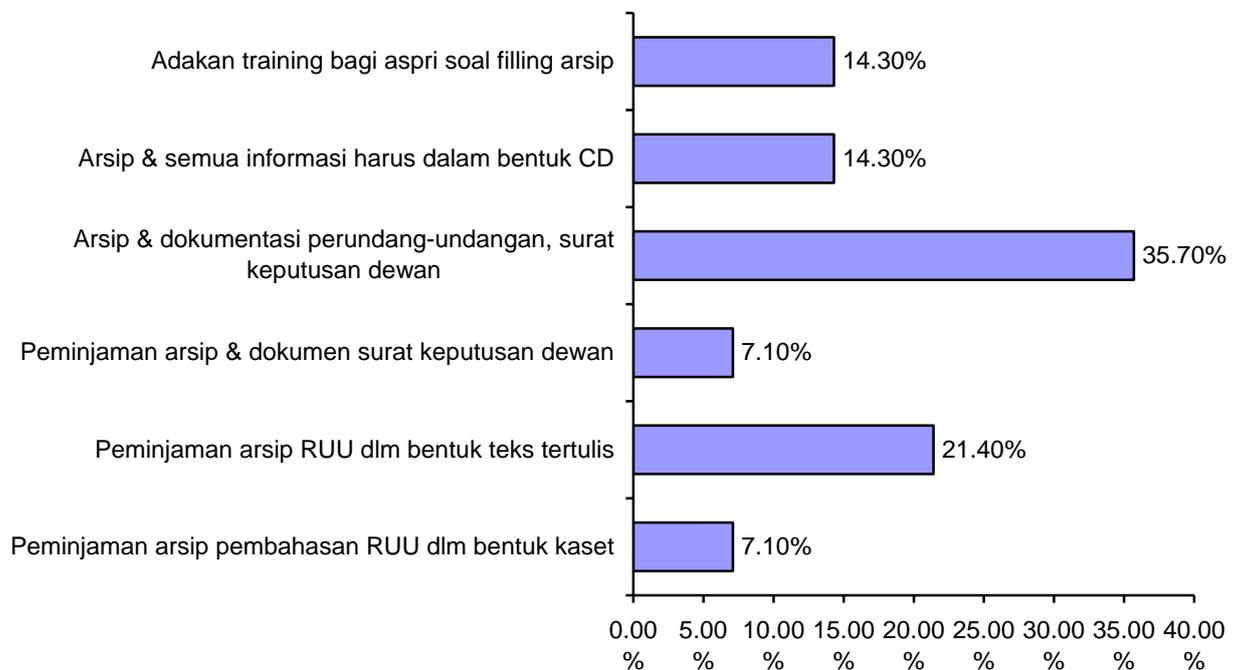


Diagram 4.15
Penilaian Terhadap Kemampuan Tenaga Arsiparis (n = 13)

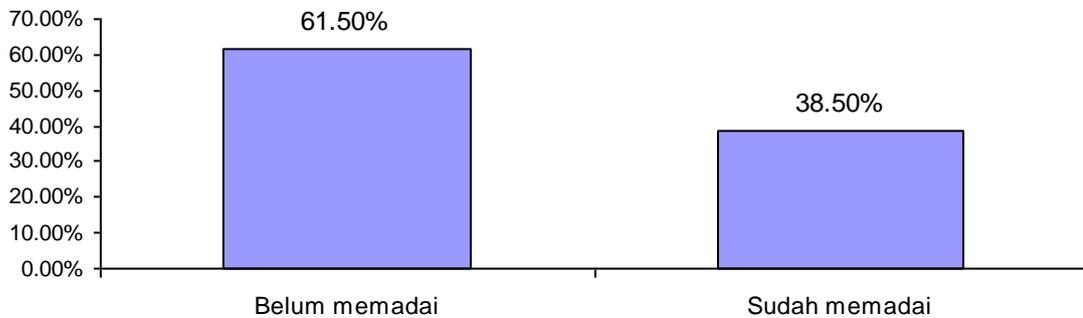
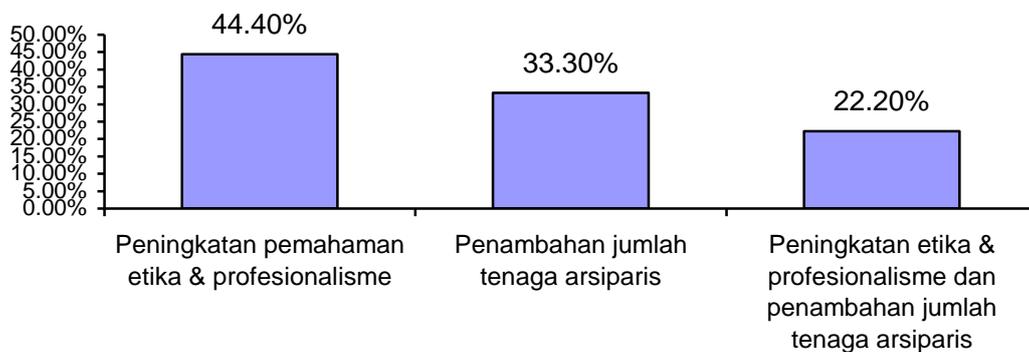


Diagram 4.16
Upaya Yang Harus Dilakukan Tenaga Arsiparis (n = 9)



Berdasarkan fraksi, hal-hal yang harus ditingkatkan kemampuannya oleh bidang layanan arsip & dokumentasi adalah: anggota Fraksi PDI-P dan PKS masing-masing sebesar 28,6% menyarankan agar bidang arsip & dokumentasi lebih meningkatkan soal, "peminjaman arsip pembahasan RUU dalam bentuk teks tertulis", "arsip & dokumentasi perundang-undangan, surat keputusan

dewan dan laporan-laporan dewan”. Sementara itu, Fraksi PKS, lebih menyoroti perlunya peningkatan ”arsip & dokumentasi perundang-undangan, surat keputusan dewan dan laporan-laporan dewan”, ”arsip & semua informasi harus dalam bentuk CD” dan ”adakan training untuk aspri soal filling arsip”. Anggota Fraksi PG (21,4%) menyarankan bidang layanan arsip & dokumentasi untuk lebih meningkatkan ”peminjaman arsip pembahasan RUU dalam bentuk teks tertulis”, ”arsip & dokumentasi perundang-undangan, surat keputusan dewan dan laporan-laporan dewan” dan ”adakan training untuk aspri soal filling arsip”. Sedangkan anggota Fraksi PAN, BPD dan PDS masing-masing 7,1% menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan bidang layanan arsip & dokumentasi soal, ”peminjaman arsip pembahasan RUU dalam bentuk teks tertulis”, Fraksi BPD soal, ”arsip & dokumentasi perundang-undangan, surat keputusan dewan dan laporan-laporan dewan” dan Fraksi PDS soal, ”peminjaman arsip pembahasan RUU dalam bentuk kaset”. Tabel berikut adalah penilaian anggota fraksi terkait kemampuan tenaga arsiparis bidang layanan arsip & dokumentasi P3DI.

Tabel 4.7
Penilaian Terhadap Kapasitas Tenaga Arsiparis (n = 13)

Penilaian	FPG	FPDI-P	F PAN	FPKS	FBPD	FPDS	Total
Belum memadai	2 (15.4%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	3 (23.1%)		1 (7.7%)	8 (61.5%)
Sudah memadai		3 (23.1%)		1 (7.7%)	1 (7.7%)	-	5 (38.5%)
Total	2 (15.4%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	13 100%)

5. Kebutuhan Layanan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana vital guna mengembangkan daya nalar kita dalam memperkuat referensi atau rujukan yang dapat memperkuat argumen kita. Terlebih bagi para anggota dewan yang dituntut untuk menguasai dan memahami berbagai hal, sehubungan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila lebih dari setengah

(54,1%) anggota dewan mengetahui keberadaan perpustakaan di lingkungan P3DI, *ironisnya*, yang tidak mengetahuinya juga cukup banyak (45,9%). Jenis-jenis layanan data & informasi yang selama ini diterima para anggota dewan dari bidang perpustakaan adalah, "peminjaman buku-buku" (41,3%), 15,2% mengaku sering menerima layanan "peminjaman buku, koran dan kliping koran, masing-masing 8,7%, sering menerima layanan disamping "peminjaman buku juga kliping koran" dan "peminjaman kliping koran" saja. Sementara sisanya, masing-masing 6,5% mengaku sering memanfaatkan jasa perpustakaan untuk "peminjaman koran/majalah", "peminjaman buku & kliping koran" dan "peminjaman buku, koran & majalah". Lebih dari separuh (63,0%) anggota dewan yang sering memanfaatkan jasa layanan perpustakaan mengaku "cukup puas" dengan kinerja staf bidang layanan perpustakaan P3DI. Sementara yang mengaku "puas" (26,1%), "tidak puas" (6,5%) dan "sangat tidak puas" (4,3%). Bagi anggota dewan yang merasa "tidak puas/sangat tidak puas" karena menurut mereka, "pelayanannya belum optimal, birokrasinya berbelit-belit" (2,4%), alasan lainnya masing-masing 1,2% adalah, "referensinya sangat terbatas", "risalah hasil rapat susah diperoleh" dan "tidak mengetahui prosedur peminjaman buku di perpustakaan". Diagram berikut semakin memperjelas penilaian anggota dewan terhadap kinerja bidang perpustakaan.

Diagram 4.17

Penilaian Anggota Dewan Terhadap Kinerja Perpustakaan (n = 46)

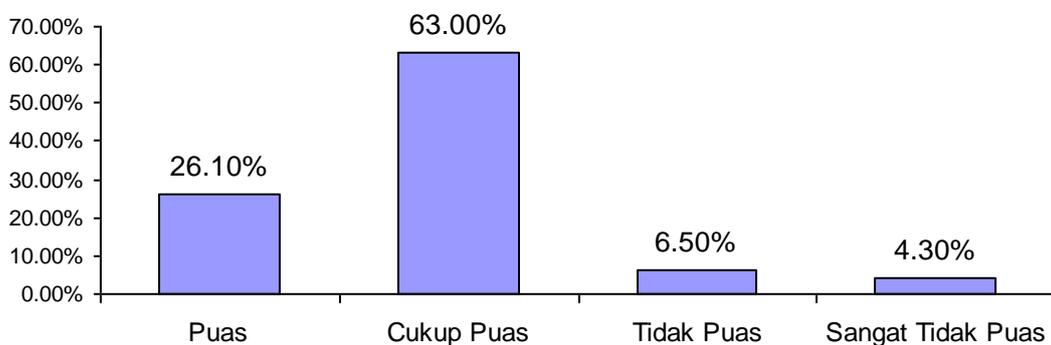
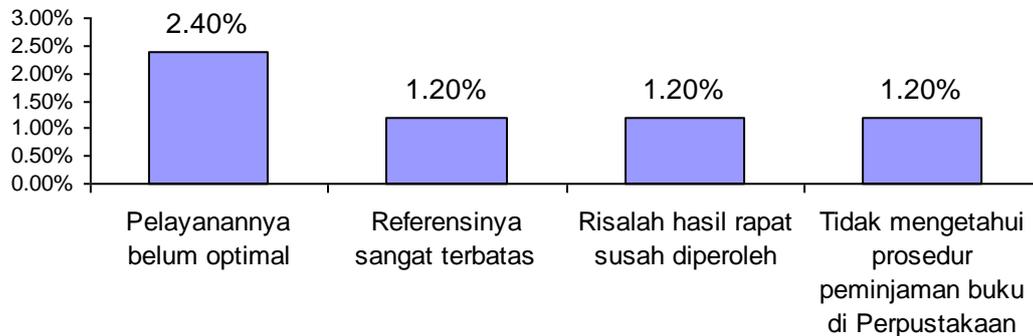


Diagram 4.18
Alasan Terhadap Ketidakpuasan Kinerja Perpustakaan (n = 5)



Untuk lebih meningkatkan kemampuan di bidang pelayanan perpustakaan, lebih dari seperempat (28,3%) anggota dewan menyarankan supaya lebih meningkatkan kemampuan manajemen dalam hal peminjaman buku-buku, sebanyak 17,4% menyarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal "peminjaman buku, koran & kliping koran", 15,2% dalam hal "peminjaman buku, koran & arsip-arsip nasional", "informasi tentang prodak perpustakaan harus diakses di website" hal ini disarankan oleh 10,9% anggota dewan. Sementara itu, masing-masing sebanyak 6,5% menyarankan agar "diadakan sosialisasi tentang perpustakaan kepada seluruh anggota dewan" dan system "peminjaman kliping koran perlu ditingkatkan" Dan sisanya, masing-masing 2,2% menyarankan, "hasil risalah-risalah rapat perlu di kliping", "harus ada training manajemen perpustakaan bagi aspri anggota dewan", "kliping koran perlu ditingkatkan & arsip tentang rapat-rapat dewan perlu diakses di internet", dan "lengkapi semua kebutuhan dewan". Bagaimana penilaian anggota dewan terhadap kinerja pustakawan di lingkungan P3DI? Diagram berikut memuat penilaian para anggota dewan berdasarkan hasil survei.

Diagram 4.19
Penilaian Terhadap Kinerja Pustakawan Di Lingkungan P3DI (n = 45)

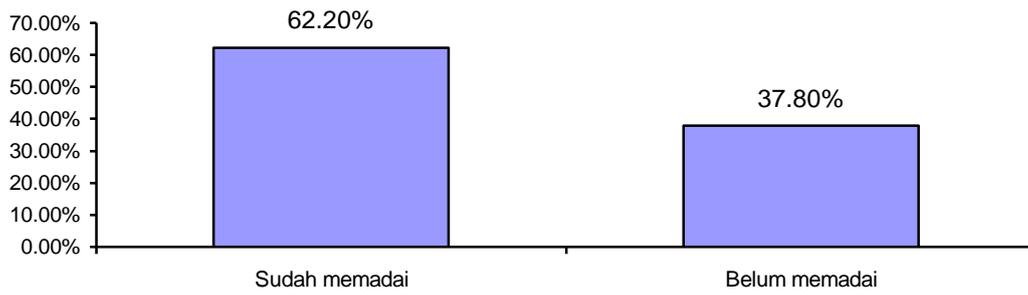
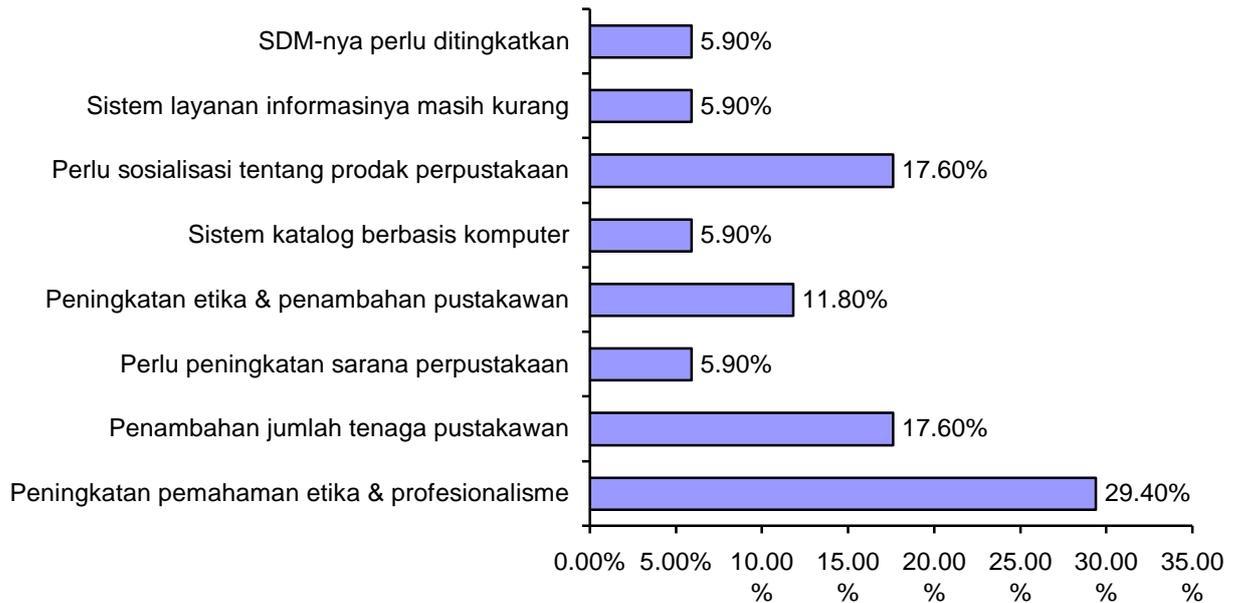


Diagram 4.20
Upaya Yang Perlu Dilakukan oleh Tenaga Pustakawan (n = 17)



Berdasarkan fraksi, sebanyak 34,8% anggota Fraksi PDI-P menyarankan untuk ditingkatkan kemampuannya dalam hal, "peminjaman buku-buku", "peminjaman kliping koran", "peminjaman buku, koran & kliping koran", "informasi tentang prodak perpustakaan harus ada di internet", "peminjaman buku, kliping koran & arsip nasional". Sebanyak 19,6% anggota Fraksi PKS, menyarankan perlunya peningkatan dalam hal, "peminjaman buku-buku", "peminjaman koran/majalah", "perlunya sosialisasi tentang perpustakaan kepada anggota dewan", "peminjaman buku, koran & kliping koran", "informasi tentang prodak perpustakaan harus ada di internet", "hasil risalah-risalah rapat perlu di kliping", "peminjaman buku, koran/majalah & kliping koran" dan "harus ada training manajemen perpustakaan bagi aspri". Saran anggota Fraksi PG (13,0%) adalah, "peminjaman buku-buku", "peminjaman kliping koran" dan "peminjaman buku, kliping koran & arsip nasional". Anggota Fraksi PD (8,7%) menyarankan, "peminjaman buku-buku", "informasi tentang prodak perpustakaan harus ada di internet" dan "kliping koran perlu ditingkatkan & arsip tentang rapat-rapat dewan perlu diakses di internet". Anggota Fraksi PPP, PAN, BPD, PBR dan PDS masing-masing sebanyak 4,3% dari fraksinya, menyarankan, "peminjaman buku-buku", "peminjaman kliping koran", "peminjaman koran/majalah", "informasi tentang prodak perpustakaan harus ada

di internet”, ”perlu nya sosialisasi tentang perpustakaan kepada anggota dewan”, ”peminjaman buku, koran & kliping koran” dan ”peminjaman buku, kliping koran & arsip nasional”.

Berdasarkan penilaian fraksi-fraksi yang ada, kinerja bidang layanan perpustakaan di nilai ”sudah memadai” (62,2%), dan sisanya (37,8%) berpendapat ”belum memadai”. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Penilaian Angg. Fraksi Terhadap Kinerja Perpustakaan (n = 45)

Penilaian	FPG	FPDI-P	FPPP	F PD	F PAN	FPKB	FPKS	FBPD	FPBR	FPDS	Total
Blm memadai	2 (4.4%)	5 (11.1%)	-	3 (6.7%)	1 (2.2%)	1 (2.2%)	4 (8.9%)	-	1 (2.2%)	-	17 (37.8%)
Sudah memadai	4 (8.9%)	11 (24.4%)	2 (4.4%)	1 (2.2%)	1 (2.2%)	-	4 (8.9%)	2 (4.4%)	1 (2.2%)	2 (4.4%)	28 (62.2%)
Total	6 (13.3%)	16 (35.6%)	2 (4.4%)	4 (8.9%)	2 (4.4%)	1 (2.2%)	8 (17.8%)	2 (4.4%)	2 (4.4%)	2 (4.4%)	45 (100%)

Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh tenaga pustakawan di lingkungan P3DI menurut para anggota fraksi di DPR, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Upaya Yang Perlu Dilakukan Tenaga Pustakawan (n = 17)

Upaya-upaya	FPG	FPDI-P	F PD	F PAN	FPKB	FPKS	FPBR	Total
Peningkatan pemahaman etika & profesionalisme	1 (5.9%)		1 (5.9%)		1 (5.9%)	2 (11.8%)	1 (2.2%)	5 (29.4%)
Penambahan jumlah tenaga pustakawan		1 (5.9%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	-		1 (2.2%)	3 (17.6%)
Perlu peningkatan sarana perpustakaan		1 (5.9%)						1 (5.9%)
Peningkatan etika, profesionalisme & jumlah pustakawan	1 (5.9%)	1 (5.9%)						2 (11.8%)
Sistem katalog berbasis komputer						1 (5.9%)		1 (5.9%)
Sosialisasi		1	1			1		3

prodak perpustakaan kepada anggota dewan		(5.9%)	(5.9%)			(5.9%)		(17.6%)
Sistem informasinya perlu ditingkatkan		1 (5.9%)						1 (5.9%)
SDM perlu lebih ditingkatkan							1 (5.9%)	1 (5.9%)
Total	2 (11.8%)	5 (29.4%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa anggota Fraksi PDI-P (29,4%) menyarankan tenaga pustakawan di lingkungan P3DI untuk lebih meningkatkan, "jumlah tenaga pustakawan", "sarana perpustakaan perlu ditingkatkan", "peningkatan pemahaman etika & profesionalisme seiring dengan penambahan jumlah tenaga pustakawan", "perlunya sosialisasi prodak perpustakaan kepada seluruh anggota dewan" dan "sistem informasi perpustakaan perlu lebih ditingkatkan". Anggota Fraksi PKS (23,5%) menyarankan pentingnya "peningkatan pemahaman etika & profesionalisme", "sistem katalog berbasis komputer" dan harus dilakukan "sosialisasi prodak perpustakaan kepada seluruh anggota dewan". Dan anggota Fraksi PG (11,8%) menyarankan pentingnya "peningkatan pemahaman etika & profesionalisme" dan "peningkatan pemahaman etika & profesionalisme yang dibarengi dengan penambahan jumlah tenaga pustakawan",

C. Kebutuhan *Technical Assistance* dan Prospek P3DI

Selain melayani bidang pengkajian, bidang data & sarana informasi, bidang arsip & dokumentasi, bidang perpustakaan, juga melayani layanan bantuan teknis bagi seluruh anggota dewan. Persoalannya, apakah para anggota dewan masih memerlukan bantuan teknis yang disediakan P3DI? Terhadap pertanyaan ini, ternyata lebih dari separuh (67,1%) anggota dewan mengakui "perlu" bantuan teknis dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas sebagai anggota DPR. Sementara itu, sebanyak 32,9% sisanya mengakui "tidak perlu" adanya bantuan teknis yang disediakan P3DI. Berdasarkan hasil uji

tabulasi silang (*crosstabulation*), dari 10 fraksi yang ada di DPR saat ini, hanya Fraksi PBR dan PDS yang mengatakan 100% "perlu" adanya bantuan teknis untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Tabel berikut memuat hasil lengkap pengakuan 10 fraksi yang ada di DPR.

Tabel 4.10
Penilaian Fraksi Terhadap Kebutuhan Layanan Bantuan Teknis (n = 85)

Penilaian	FPG	FPDI-P	FPPP	F PD	F PAN	FPKB	FPKS	FBPD	FPBR	FPDS	Total
Perlu	5 (5.9%)	14 (16.5%)	5 (5.9%)	8 (9.4%)	7 (8.2%)	2 (2.4%)	9 10.6%	1 (1.2%)	3 (3.5%)	3 (3.5%)	57 (67.1%)
Tidak Perlu	7 (8.2%)	10 (11.8%)	1 (1.2%)	4 (4.7%)	1 (1.2%)	3 (3.5%)	1 (1.2%)	1 (1.2%)	-	-	28 (32.9%)
Total	12 (14.1%)	24 (28.2%)	6 (7.1%)	12 (14.1%)	8 (9.4%)	5 (5.9%)	10 11.8%	2 (2.4%)	3 (3.5%)	3 (3.5%)	85 (100%)

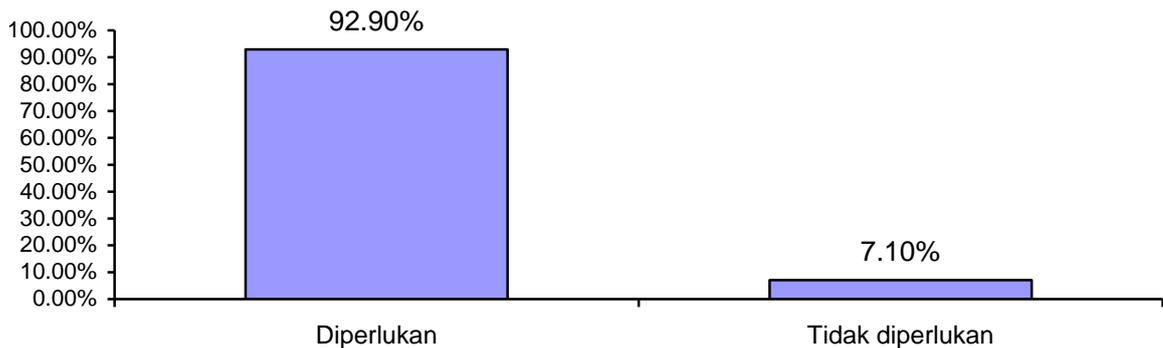
Terlihat pada tabel di atas, bahwa ke 10 anggota fraksi yang ada di DPR mengaku "perlu" (67,1%) bantuan teknis yang disediakan P3DI. Hanya Fraksi PKB yang sebagian anggotanya (3,5%) mengaku "tidak perlu" adanya bantuan teknis.

Pertanyaan berikutnya adalah, bantuan teknis seperti apakah yang diperlukan para anggota dewan? Terhadap pertanyaan ini, hampir semua (98%) anggota dewan mengaku bahwa selama ini bidang-bidang yang diperlukan adalah, "makalah ringkas tentang RUU yang sedang di kaji" (11,8%), "staf ahli dan batuan teknis lainnya sesuai bidang tugas dewan" (8,2%), "perlu kajian dalam bentuk jurnal, buletin, untuk bidang komisi, fraksi dan pansus" (5,9%), "perlu tenaga ahli di bidang komputer" (4,7%) dan masing-masing ,5%, berturut-turut adalah, "perlu analisis kajian sesuai bidang masing-masing", "perlu legal drafter dalam bentuk konsultasi & bantuan teknis ketika anggota dewan dalam Panja", "P3DI harus melayani kebutuhan anggota dewan sesuai bidang komisi & fraksi" dan "semua bidang sesuai tugas-tugas komisi". Hasil lengkap dapat di lihat di lampiran tabel frekuensi.

Eksistensi P3DI ternyata masih "diperlukan" dalam rangka menunjang tugas dan fungsi sebagai anggota dewan. Hal ini terbukti dari jawaban para anggota DPR terhadap pertanyaan, apakah peran P3DI masih diperlukan?

Hampir semua (92,9%) anggota dewan menjawab "diperlukan", hanya sebagian kecil (7,1%) yang sudah tidak memerlukan eksistensi P3DI, seperti terlihat pada diagram berikut.

Diagram 4.21
Prospek P3DI (n = 85)



Bagaimana penilaian anggota fraksi terhadap eksistensi P3DI? Tabel berikut menyajikan pengakuan para anggota fraksi di DPR terhadap eksistensi P3DI.

Tabel 4.11
Prospek P3DI Berdasarkan Fraksi (n = 85)

Penilaian	FPG	FPDI-P	FPPP	F PD	F PAN	FPKB	FPKS	FBPD	FPBR	FPDS	Total
Diperlukan	12 (14.1%)	22 (25.9%)	6 (7.1%)	10 (11.8%)	7 (8.2%)	5 (5.9%)	10 11.8%	2 (2.4%)	2 (2.4%)	3 (3.5%)	79 (92.9%)
Tidak Diperlukan		2 (2.4%)		2 (2.4%)	1 (1.2%)				1 (1.2%)	-	6 (7.1%)
Total	12 (14.1%)	24 (28.2%)	6 (7.1%)	12 (14.1%)	8 (9.4%)	5 (5.9%)	10 11.8%	2 (2.4%)	3 (3.5%)	3 (3.5%)	85 (100%)

Terlihat pada tabel di atas, ada 4 fraksi yang sebagian anggotanya yang berpendapat bahwa P3DI "tidak diperlukan lagi". Jumlah atau persentase ke empat anggota fraksi tersebut adalah, anggota Fraksi PDI-P sebanyak 2,4%, Fraksi PD 2,4%, Fraksi PAN 1,2% dan Fraksi PBR 1,2%, dengan total 7,1%.

Secara umum, upaya-upaya yang harus dilakukan P3DI dalam rangka meningkatkan daya dukungnya terhadap kinerja anggota dewan adalah:

1. Sebanyak 21,2% anggota dewan menyarankan agar "P3DI harus melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota dewan"
2. P3DI "harus lebih pro aktif & hasil-hasil kajian segera berikan kepada anggota dewan" (15,3%)
3. Tingkatkan pelayanannya kepada anggota dewan, permudah akses data, tambah jumlah peneliti, fungsikan peneliti itu sesuai kapasitasnya" (11,8%)
4. Harus lebih pro aktif dalam mensosialisasikan eksistensi P3DI kepada anggota dewan, baik lisan maupun tulisan" (8,2%).
5. Masing-masing sebanyak 5,9% menyarankan, "tingkatkan pelayanan kepada dewan, baik teknis maupun non teknis" dan "tingkatkan lagi pelayanan kepada dewan & permudah akses data yang diperlukan anggota dewan"
6. Masing-masing sebanyak 3,5% menyarankan agar "kuantitas maupun kualitas staf/peneliti P3DI harus ditambah", "support data untuk badan legislasi, draft RUU perlu ditingkatkan, publikasikan data-data hasil penelitian".

Secara umum, masukan-masukan atau saran anggota dewan kepada P3DI adalah:

1. Sebanyak 28,2% anggota dewan menyarankan agar segera mensosialisasikan keberadaan P3DI kepada seluruh anggota dewan, kerjasama dengan aspri, kinerja harus lebih ditingkatkan lagi.
2. 24,7% anggota dewan menyarankan agar staf P3DI meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme kerja.
3. 15,3% anggota dewan menyarankan agar sosialisasikan keberadaan P3DI kepada seluruh anggota dewan secara periodik
4. 8,2% anggota dewan menyarankan agar data atau informasi hasil kajian langsung diberikan kepada dewan, disamping P3DI diminta untuk lebih meningkatkan pelayanannya.
5. 5,9% anggota dewan menyarankan agar P3DI harus lebih pro aktif memberikan sosialisasi kepada seluruh dewan, baik lisan maupun tulisan

6. 3,5% anggota dewan menyarankan agar kualitas data dan program di P3DI harus *up to date*, eksistensi P3DI harus lebih tersorot
7. Masing-masing sebanyak 2,4% anggota dewan menyarankan agar "P3DI harus pro aktif, memberikan data atau informasi harus tepat dan benar", "harus ada pencerahan internal di lingkungan P3DI, peneliti harus ditambah dan berikan budget penelitian yang memadai" dan "perlu peningkatan tenaga ahli untuk mengembangkan pikiran-pikiran dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada anggota dewan".

Menurut anggota fraksi-fraksi yang ada di DPR, apa yang harus segera dilakukan oleh P3DI? Tabel berikut menyajikan masukan-masukan secara umum bagi P3DI menurut fraksinya masing-masing.

1. Fraksi PDI-P (28,2%) memberikan masukan, "buat news letter", "harus lebih pro aktif memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota dewan", "hasil kajian segera berikan kepada anggota dewan", "kualitas maupun kuantitas staf P3DI harus ditambah", "pahami tupoksi secara benar sesuai tujuan pembentukannya", "pangadaan buletin, jurnal minimal sebulan sekali", "susun layanan informasi yang cepat, tepat dan akurat", "tingkatkan pelayanan kepada dewan, permudah akses data".
2. Fraksi PG (14,1%) memberikan masukan, "harus lebih pro aktif memberikan sosialisasi kepada anggota dewan dan aspri", " kualitas maupun kuantitas staf P3DI harus ditambah", "pahami tupoksi secara benar sesuai tujuan pembentukannya", "tingkatkan pelayanan kepada dewan, permudah akses data", "support data untuk badan legislasi dan tingkatkan draf UU".
3. Fraksi PD (14,1%) memberikan masukan, "bantu sekretaris/aspri dalam menjalankan tugas membantu dewan", "data/informasi yang terkait kinerja dewan segera berikan kepada anggota dewan", "harus lebih pro aktif memberikan sosialisasi kepada anggota dewan dan aspri".
4. Fraksi PKS (11,8%) memberikan masukan, "harus lebih pro aktif memberikan sosialisasi kepada anggota dewan dan aspri", "lengkapi data-data yang sudah ada, sosialisasikan kepada anggota dewan", "perlu asisten S-2 untuk mengurus masalah-masalah politik sesuai kebutuhan politisi", "tingkatkan

pelayanan kepada dewan, permudah akses data”, ”tingkatkan staf ahli dalam hal analisis anggaran, jam kerja P3DI sesuai jam kerja anggota dewan”.

5. Fraksi PAN (9,4%) memberikan masukan, ”harus lebih pro aktif memberikan sosialisasi kepada anggota dewan dan aspri”, ”hasil kajian harus segera berikan kepada anggota dewan”, ”tingkatkan pelayanan kepada dewan, permudah akses data”.
6. Fraksi PPP (7,1%) memberikan masukan, ”tingkatkan pelayanan kepada anggota dewan, baik teknis maupun non teknis”, ”support data untuk badan legislasi dan tingkatkan draf UU”, ”tingkatkan pelayanan kepada dewan, permudah akses data”.
7. Fraksi PKB (5,9%) memberikan masukan, ”harus lebih pro aktif, hasil kajian segera berikan kepada anggota dewan”, ”support data untuk badan legislasi dan tingkatkan draf UU”, ”tingkatkan pelayanan kepada dewan, permudah akses data”.
8. Fraksi PBR (3,5%) memberikan masukan, ”harus lebih pro aktif, hasil kajian harus segera berikan kepada anggota dewan”, ”informasi tentang P3DI perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota dewan”.
9. Fraksi PDS (3,5%) memberikan masukan, ”kinerja P3DI harus lebih efektif dan efisien”, ”kualitas maupun kuantitas staf P3DI harus ditambah”, ”pengadaan arsip/kliping informasi secara on line”.
10. Fraksi BPD (2,4%) memberikan masukan, ”harus cepat tanggap dalam menangani keluhan anggota dewan maupun aspri”, ”informasi tentang P3DI perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota dewan”.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran yang dijelaskan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Keberadaan P3DI sangat diperlukan oleh Anggota Dewan. Tetapi selama ini, di satu sisi keberadaan P3DI oleh sebagian besar Anggota DPR dikenal hanya melalui publikasi yang dihasilkan, walaupun ini masih belum menyeluruh atau dalam jumlah terbatas. Sementara itu, di sisi lain banyak Anggota DPR yang tidak mengetahui jenis-jenis layanan yang diberikan oleh P3DI. Kondisi ini terjadi karena sosialisasi keberadaan P3DI oleh pihak Sekretariat Jenderal kurang giat dilakukan. Namun demikian, kurangnya sosialisasi keberadaan P3DI ini bagi internal P3DI tidak terlepas dari masalah di tingkat internal dikalangan peneliti P3DI itu sendiri. Kesan ini muncul karena ada keraguan, seandainya semua Anggota DPR mengetahui dan memanfaatkan jasa pelayanan P3DI, terutama terhadap hasil kerja peneliti, justru akan membuat P3DI tidak sanggup melayani permintaan tersebut. Ini dilatar belakangi oleh masih sedikitnya jumlah peneliti dibandingkan dengan jumlah Anggota DPR dan beragamnya kebutuhan informasi masing-masing.
2. Pelayanan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi kepada Anggota Dewan dinilai masih kurang karena sebagian Anggota DPR menganggap prosedur birokrasinya sangat berbelit. Persepsi ini muncul terutama bagi Anggota Dewan yang baru pertama kali memanfaatkan jasa P3DI atau tidak pernah memanfaatkan P3DI, padahal semua permintaan selalu dilayani oleh P3DI tanpa prosedur. Secara umum pendapat Anggota DPR menilai kurangnya kinerja P3DI dikarenakan:

- Peneliti dinilai tidak profesional dan analisis kajiannya masih rendah. Ketidakprofesionalan peneliti ini bisa menjadi otokritik bagi P3DI dalam meningkatkan kinerjanya. Namun demikian, tidak profesionalnya peneliti ini lebih merupakan persepsi yang tidak memiliki penjelasan lebih lanjut atas lontaran pendapat anggota DPR tersebut, terutama mengenai masalah mengapa dan apa latar belakang yang menyebabkan munculnya opini semacam ini. Sedangkan analisis kajian dianggap masih rendah karena objek penelitian terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota DPR. Disamping itu, Anggota mempunyai tuntutan besar terhadap peneliti untuk mengetahui segala hal, sehingga menyebabkan tidak kondusifnya pembentukan keahlian peneliti terhadap bidang tertentu secara profesional. Artinya, tuntutan Anggota DPR mendorong peneliti menjadi tidak spesialis. Berkaitan dengan kinerja peneliti juga Anggota Dewan menuntut P3DI untuk bersifat proaktif dalam memberikan pelayanan keahliannya.

